

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 285 orang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di Intern dilingkungan Kementerian Pertanian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dan perannya sebagai *Quality Assurance dan Advisory Services* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan Permentan No. 40 Tahun 2020 terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

A. 1.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian selama lima tahun serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi yaitu ***"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju Petani Sejahtera"***.

2. Arah Pengawasan

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban upaya-upaya arah pengawasan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan arah pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan berupa terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan;

2. Memberi peringatan dini, meningkatkan efektivitas dan pengendalian intern, serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian;
3. Memastikan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan benar oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
4. Mewujudkan organisasi Itjentan yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar: integritas, inovatif, professional dan kredibilitas.

A.1.3. SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka Inspektorat Jenderal Kermenterian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut :

1. Mewujudkan lembaga pengawas intern yang unggul;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
3. Meningkatkan Maturitas SPI di Kementerian Pertanian;
4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan pertanian dan pangan;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan internal;
6. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal;
7. Mewujudkan tata kelola anggaran Inspektorat Jenderal yang efisien dan akuntabel.

A.1.3. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat

diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terdapat 2 jenis kegiatan yaitu Kegiatan Strategis dan Kegiatan Penunjang. Indikator Pelaksanaan Anggaran pada Aplikasi OMSPAN per 30 Juni 2022 progres persentase pencapaian output pada satker Itjentan. (rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada lampiran A.1).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Itjentan Semester I Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang mempunyai konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dan nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I tahun 2022 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI Eselon I.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan First In First Out (FIFO) sebagaimana kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode First In First Out (FIFO), bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang
Jangka
Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai yang tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) pada entitas Pemerintah Pusat .
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN

Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah

Rp9.127.550,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 30 Juni 2022 adalah senilai Rp9.127.550,00 atau mencapai 60,85 persen (pembulatan 61 persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan Pendapatan Lain-lain.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak memiliki potensi PNBPN, sehingga estimasi pendapatan tahun 2022 hanya ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Dan adanya pandemi COVID-19 tidak berdampak pada Pendapatan PNBPN Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.1
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2022

Akun	Uraian	Estimasi	Pendapatan	Pengembalian	Pendapatan	%
		Pendapatan	Bruto		Netto	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4259	Pendapatan lain -lain	15.000.000	9.127.550	-	9.127.550	60,85
Total		15.000.000	9.127.550	-	9.127.550	60,85

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 30 Juni 2022 mengalami penurunan senilai Rp7.481.760,00 atau 45,05 persen jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2021.

Tabel B.1.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	30 Juni 2022			30 Juni 2021			Kenaikan /	
	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	175.300	-	175.300	14.185.510	-	14.185.510	(14.010.210)	(98,76)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	-	-	-	2.423.800	-	2.423.800	(2.423.800)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	8.952.250	-	8.952.250	-	-	-	8.952.250	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan	9.127.550	-	9.127.550	16.609.310	-	16.609.310	(7.481.760)	(45,05)

Penurunan Realisasi PNBP pada Tahun 2022 yang paling signifikan adalah karena seluruh sisa LS Tahun 2021 telah disetorkan pada tahun berjalan sehingga tidak ada setoran sisa LS tahun 2021 yang disetorkan ditahun 2022, yang membentuk penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL), namun terdapat pendapatan penyelesaian Ganti Rugi oleh Pihak ketiga senilai 8.952.250,00 yang pada semester I tahun 2021 tidak terdapat setoran tersebut.

Realisasi PNBP per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp9.127.550,00 dan data pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) adalah senilai Rp9.127.550,00, sehingga tidak terdapat selisih. (Perbandingan Realisasi Pendapatan (LRA) dan Aplikasi SIMPONI dapat dilihat pada lampiran pendukung B.2.).

Realisasi
Belanja Negara
Rp40.031.958.5
82,00

B.2. BELANJA

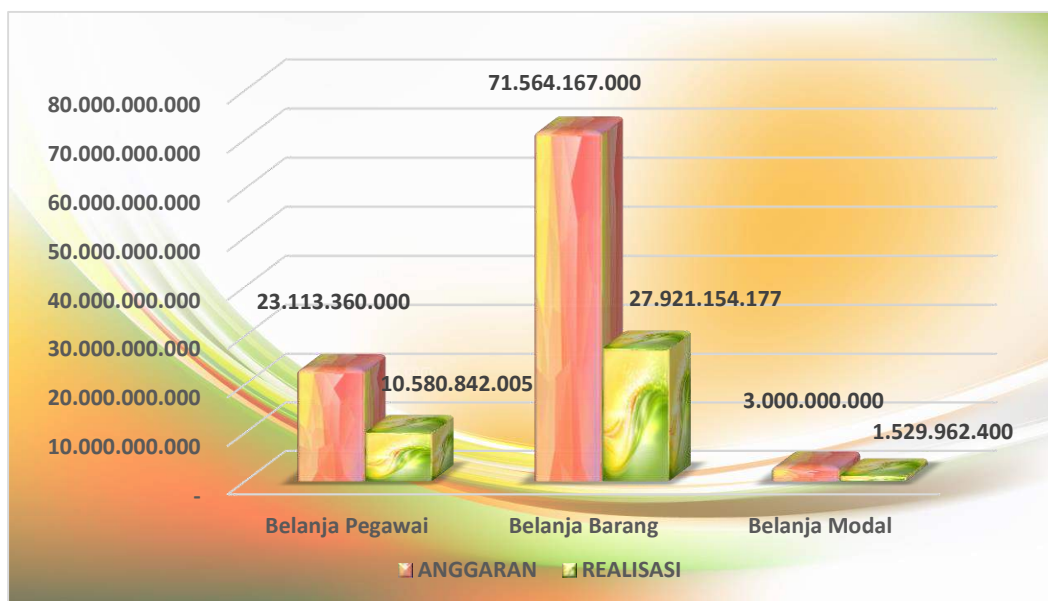
Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (netto) per 30 Juni 2022 senilai Rp40.031.958.582,00 atau 40,98 persen (pembulatan 41 persen) dari anggaran senilai Rp97.677.527.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp76.882.114,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2022 sebagai berikut.

Tabel B.2.1.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	23.113.360.000	10.582.411.901	1.569.896	10.580.842.005	46
52	Belanja Barang	71.564.167.000	27.996.466.395	75.312.218	27.921.154.177	39
53	Belanja Modal	3.000.000.000	1.529.962.400	-	1.529.962.400	51
Total Belanja		97.677.527.000	40.108.840.696	76.882.114	40.031.958.582	41

Grafik B.2

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2022



Pada Semester I Tahun 2022 telah dilakukan 1 kali Revisi DIPA dan 2 kali revisi RKA-KL. Revisi DIPA tersebut merupakan penyamaan halaman III DIPA dan hanya terjadi penggeseran pada beberapa komponen nilai dalam KRO namun tidak menggeser total dari masing-masing KRO. Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini.

Tabel B.2.2

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 30 Juni 2022

Uraian	Tahun 2022		Selisih
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan Lain-lain	15.000.000	15.000.000	-
Jumlah Pendapatan	15.000.000	15.000.000	-
Belanja			
Belanja Pegawai	23.113.360.000	23.113.360.000	-
Belanja Barang	71.564.167.000	71.564.167.000	-
Belanja Modal	3.000.000.000	3.000.000.000	-
Jumlah Belanja	97.677.527.000	97.677.527.000	-

Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran senilai Rp97.677.527.000,00 dan sampai dengan Semester I TA. 2022 tidak terdapat potongan anggaran.

Total anggaran 2022 senilai Rp97.677.527.000,00 dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp1.879.050.000,00 dan pada Semester I TA.2022 telah terealisasi senilai Rp719.549.278,00 atau 38,29 persen dari total anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel B.2.3
Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

KODE	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi Netto	%	Anggaran 2021	Realisasi Netto	%	Kenaikan / Penurunan	
		(Rp)	30-Jun-22 (Rp)		(Rp)	30-Jun-21 (Rp)		(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	23.113.360.000	10.580.842.005	45,78	23.113.360.000	12.182.374.548	52,71	(1.601.532.543)	(6,93)
52	Belanja Barang	71.564.167.000	27.921.154.177	39,02	67.498.501.000	30.213.196.393	44,76	(2.292.042.216)	(5,75)
53	Belanja Modal	3.000.000.000	1.529.962.400	51,00	9.388.139.000	1.732.293.978	18,45	(202.331.578)	32,55
	Jumlah	97.677.527.000	40.031.958.582	40,98	100.000.000.000	44.127.864.919	44,13	(4.095.906.337)	(3,14)

Realisasi Belanja (Netto) yang berakhir 30 Juni 2022 mengalami penurunan senilai Rp4.095.906.337,00 atau 3,14 persen dibandingkan realisasi per 30 Juni 2021, karena pada Pelaksanaan Audit belum dapat terealisasi secara maksimal.

Belanja Pegawai **B.3. BELANJA PEGAWAI**

Rp10.580.842.005,00

Realisasi Belanja Pegawai (netto) adalah Realisasi Belanja Pegawai per tanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 30 Juni 2022 senilai Rp10.580.842.005,00 atau sebesar 45,78 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp23.113.360.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp1.569.896,00.

Tabel B.3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Gaji Pokok PNS	15.796.160.000	7.542.918.060	-	7.542.918.060	47,75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	330.000	105.115	48	105.067	31,84
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.220.000.000	540.556.392	825.408	539.730.984	44,24
Belanja Tunjangan anak PNS	375.000.000	154.554.842	165.080	154.389.762	41,17
Belanja Tunjangan Struktural PNS	518.840.000	134.970.000	-	134.970.000	26,01
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.288.803.000	1.142.290.000	-	1.142.290.000	49,91
Belanja Tunjangan PPH PNS	140.145.000	62.337.032	-	62.337.032	44,48
Belanja Tunjangan Beras PNS	748.960.000	399.251.460	579.360	398.672.100	53,23
Belanja Uang Makan PNS	1.553.695.000	501.937.000	-	501.937.000	32,31
Belanja Tunjangan Umum PNS	332.035.000	102.450.000	-	102.450.000	30,86
Belanja Uang Lembur	139.392.000	1.042.000	-	1.042.000	0,75
Jumlah Belanja Pegawai	23.113.360.000	10.582.411.901	1.569.896	10.580.842.005	45,78

Pengembalian Belanja senilai Rp1.569.896,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan yang disebabkan adanya potongan tunjangan suami/istri/anak dan tunjangan beras.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai Rp10.580.842.005,00 dan Rp12.182.374.548,00.

Tabel B.3.2
Perbandingan Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15.796.160.000	7.542.918.060	47,75	16.146.160.000	8.605.776.720	53,30	(1.062.858.660)	(5,55)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	330.000	105.115	31,85	330.000	121.294	36,76	(16.179)	(4,90)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.220.000.000	540.556.392	44,31	1.220.000.000	631.733.506	51,78	(91.177.114)	(7,47)
Belanja Tunjangan anak PNS	375.000.000	154.554.842	41,21	375.000.000	173.904.292	46,37	(19.349.450)	(5,16)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	518.840.000	134.970.000	26,01	518.840.000	209.460.000	40,37	(74.490.000)	(14,36)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.288.803.000	1.142.290.000	49,91	1.938.803.000	1.225.080.000	63,19	(82.790.000)	(13,28)
Belanja Tunjangan PPH PNS	140.145.000	62.337.032	44,48	140.145.000	98.101.566	70,00	(35.764.534)	(25,52)
Belanja Tunjangan Beras PNS	748.960.000	399.251.460	53,31	748.960.000	458.201.340	61,18	(58.949.880)	(7,87)
Belanja Uang Makan PNS	1.553.695.000	501.937.000	32,31	1.501.300.000	587.483.000	39,13	(85.546.000)	(6,83)
Belanja Tunjangan Umum PNS	332.035.000	102.450.000	30,86	332.035.000	135.330.000	40,76	(32.880.000)	(9,90)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	-	-	-	52.395.000	52.395.000	100,00	(52.395.000)	(100,00)
Belanja Uang Lembur	139.392.000	1.042.000	0,75	139.392.000	5.858.000	4,20	(4.816.000)	(3,46)
Jumlah Belanja Pegawai (Bruto)	23.113.360.000	10.582.411.901	45,78	23.113.360.000	12.183.444.718	52,71	(1.601.032.817)	(6,93)
Pengembalian Belanja	-	1.569.896	-	-	1.070.170	-	499.726	-
Jumlah Belanja Pegawai (Netto)	23.113.360.000	10.580.842.005	45,78	23.113.360.000	12.182.374.548	52,71	(1.601.532.543)	(6,93)

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.601.532.543,00 dibandingkan realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2021. Penurunan disebabkan adanya honor pegawai non PNS yang pada tahun 2021 sebagian masih menggunakan akun belanja gaji pokok pegawai non PNS, sedangkan tahun 2022 seluruhnya tercatat pada akun belanja barang sesuai dengan rekomendasi BPK RI dan karena adanya pegawai yang pensiun.

Belanja Barang
Rp27.921.154.1
77,00

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp27.921.154.177,00 atau 39,02 persen (pembulatan 39 persen) dari Pagu Anggaran senilai Rp71.564.167.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp75.312.218,00.

Tabel B.4.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan
Sub Kelompok Belanja per 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Keperluan Perkantoran	1.142.777.000	481.542.450	-	481.542.450	42,14
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	165.300.000	-	-	-	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	187.200.000	11.243.250	-	11.243.250	6,01
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	484.680.000	167.890.000	-	167.890.000	34,64
Belanja Barang Operasional Lainnya	147.752.000	36.593.300	-	36.593.300	24,77
Belanja Barang Operasional-Penganganan Pandemi COVID 19	494.625.000	381.644.993	-	381.644.993	77,16
Belanja Bahan	1.267.361.000	355.746.000	-	355.746.000	28,07
Belanja Honor Output Kegiatan	52.150.000	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.551.189.000	808.469.600	-	808.469.600	31,69
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.056.645.000	756.005.176	-	756.005.176	71,55
Belanja Langganan Telepon	33.600.000	3.944.903	-	3.944.903	11,74
Belanja Sewa	920.165.000	15.514.000	-	15.514.000	1,69
Belanja Jasa Profesi	1.167.600.000	73.900.000	-	73.900.000	6,33
Belanja Jasa Lainnya	85.994.000	39.211.712	-	39.211.712	45,60
Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	1.384.425.000	337.904.285	-	337.904.285	24,41
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.216.000	126.214.520	-	126.214.520	37,88
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.955.880.000	828.002.674	-	828.002.674	42,33
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.740.000	57.137.750	-	57.137.750	20,14
Belanja Perjalanan Biasa	45.330.694.000	19.364.488.122	49.600.718	19.314.887.404	42,61
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	911.700.000	134.500.000	1.310.000	133.190.000	14,61
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149.400.000	16.040.000	150.000	15.890.000	10,64
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.458.074.000	4.000.473.660	24.251.500	3.976.222.160	34,70
Jumlah Belanja Barang	71.564.167.000	27.996.466.395	75.312.218	27.921.154.177	39,02

Pengembalian belanja barang senilai Rp75.312.218,00 adalah pengembalian belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri selama tahun berjalan.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp27.921.154.177,00 dan Rp30.213.196.393,00.

Tabel B.4.2
Perbandingan Belanja Barang
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	1.142.777.000	481.542.450	42,14	1.084.870.000	581.837.000	53,63	(100.294.550)	(11,49)
Belanja penambah daya Tahan Tubuh	165.300.000	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	187.200.000	11.243.250	6,01	216.000.000	53.908.000	24,96	(42.664.750)	(18,95)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	484.680.000	167.890.000	34,64	462.580.000	195.702.000	42,31	(27.812.000)	(7,67)
Belanja Barang Operasional Lainnya	147.752.000	36.593.300	24,77	60.200.000	36.108.800	59,98	484.500	(35,21)
Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID 19	494.625.000	381.644.993	77,16	-	-	-	381.644.993	77,16
Belanja Bahan	1.267.361.000	355.746.000	28,07	1.539.911.000	230.246.450	14,95	125.499.550	13,12
Belanja Honor Output Kegiatan	52.150.000	-	-	71.400.000	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.551.189.000	808.469.600	31,69	3.538.219.000	1.158.525.559	32,74	(350.055.959)	(1,05)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.056.645.000	756.005.176	71,55	1.215.302.000	759.467.011	62,49	(3.461.835)	9,06
Belanja Langganan Telepon	33.600.000	3.944.903	11,74	71.085.000	4.294.388	6,04	(349.485)	5,70
Belanja Sewa	920.165.000	15.514.000	1,69	399.000.000	14.050.000	3,52	1.464.000	(1,84)
Belanja Jasa Profesi	1.167.600.000	73.900.000	6,33	1.187.900.000	220.400.000	18,55	(146.500.000)	(12,22)
Belanja Jasa Lainnya	85.994.000	39.211.712	45,60	296.551.000	209.310.287	70,58	(170.098.575)	(24,98)
Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	1.384.425.000	337.904.285	24,41	3.242.205.000	785.207.846	24,22	(447.303.561)	0,19
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	333.216.000	126.214.520	37,88	332.848.000	96.709.233	29,06	29.505.287	8,82
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.955.880.000	828.002.674	42,33	2.099.030.000	776.483.317	36,99	51.519.357	5,34
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.740.000	57.137.750	20,14	369.671.000	66.643.100	18,03	(9.505.350)	2,11
Belanja Perjalanan Biasa	45.330.694.000	19.364.488.122	42,72	38.042.942.000	20.992.216.030	55,18	(1.627.727.908)	(12,46)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	911.700.000	134.500.000	14,75	1.158.600.000	249.540.000	21,54	(115.040.000)	(6,79)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149.400.000	16.040.000	10,74	270.200.000	22.680.000	8,39	(6.640.000)	2,34
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.458.074.000	4.000.473.660	34,91	11.839.987.000	3.783.249.280	31,95	217.224.380	2,96
Jumlah Belanja Barang (Bruto)	71.564.167.000	27.996.466.395	39,12	67.498.501.000	30.236.578.301	44,80	(2.240.111.906)	(5,68)
Pengembalian Belanja	0	75.312.218	-	-	23.381.908	-	51.930.310	-
Jumlah Belanja Barang (Netto)	71.564.167.000	27.921.154.177	39,02	67.498.501.000	30.213.196.393	44,76	(2.292.042.216)	(5,75)

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.292.042.216,00 dibandingkan realisasi belanja barang per 30 Juni 2021. Hal ini karena masih tingginya kasus COVID-19, sehingga kegiatan Pelaksanaan Audit sebagian besar dilaksanakan di wilayah Jawa, yang mengakibatkan penyerapan anggarannya kurang maksimal. Karena masih tingginya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2022 maka anggaran belanja untuk penanganan Pandemi Covid-19 masih diadakan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengalokasikan belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp1.879.050.000,00. Pada Semester I TA.2022 anggaran tersebut telah terserap senilai Rp719.549.278,00 atau 38,29 persen dari nilai anggaran.

Belanja Jasa - Penanganan Covid-19 dibelanjakan untuk pengadaan masker, handsanitizer, vitamin dan obat-obatan untuk pegawai, fasilitasi isolasi dan fisioterapi/obat-obatan kepada pegawai yang terkena Covid-19, biaya test swab, tes rapid antigen serta penyemprotan desinfektan pada Gedung B (Itjentan) serta rumah pegawai yang terpapar virus Covid-19. Untuk lebih jelasnya rincian Belanja Barang untuk penanganan Covid-19 dapat dilihat pada Lampiran pendukung.

Belanja Modal
Rp1.529.962.400,00

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp1.529.962.400,00 atau 51 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp3.000.000.000,00.

Tabel B.5.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.165.307.000	1.219.368.550	-	1.219.368.550	56,31
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	150.000.000	90.909.000	-	90.909.000	60,61
Belanja Modal Lainnya	219.693.000	219.684.850	-	219.684.850	100,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	465.000.000	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	3.000.000.000	1.529.962.400	-	1.529.962.400	51,00

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.529.962.400,00 dan Rp1.732.293.978,00. Dan tidak terdapat pengembalian belanja modal pada tahun berjalan.

Tabel B.5.2
Perbandingan Belanja Modal
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.165.307.000	1.219.368.550	56,31	6.409.064.000	444.832.000	6,94	774.536.550	49,37
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	150.000.000	90.909.000	60,61	-	-	-	90.909.000	60,61
Belanja Modal Lainnya	219.693.000	219.684.850	100,00	2.220.575.000	1.254.461.978	56,49	(1.034.777.128)	43,50
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	465.000.000	-	-	758.500.000	33.000.000	4,35	(33.000.000)	(4,35)
Jumlah Belanja Modal (Bruto)	3.000.000.000	1.529.962.400	51,00	9.388.139.000	1.732.293.978	18,45	(202.331.578)	32,55
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal (Netto)	3.000.000.000	1.529.962.400	51,00	9.388.139.000	1.732.293.978	18,45	(202.331.578)	32,55

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp202.331.578,00 dibandingkan realisasi belanja barang per 30 Juni 2021 hal ini karena adanya penurunan anggaran belanja modal. Namun persentase penyerapan di Semester I tahun 2022 meningkat 32,55 persen.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.219.368.55
0,00

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp1.219.368.550,00 atau sebesar 56,31 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp2.165.307.000,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.219.368.550,00 dan Rp444.832.000,00.

Tabel B.5.1.1
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.165.307.000	1.219.368.550	56,31	6.409.064.000	444.832.000	6,94	774.536.550
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Bruto)	2.165.307.000	1.219.368.550	56,31	6.409.064.000	444.832.000	6,94	774.536.550	49,37
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Netto)	2.165.307.000	1.219.368.550	56,31	6.409.064.000	444.832.000	6,94	774.536.550	49,37

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 mengalami peningkatan senilai Rp774.536.550 atau 49,37 persen dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2021, karena percepatan penyerapan belanja modal yang pada Semester I tahun 2022 telah mencapai 56,31 persen.

(Rincian Belanja Modalnya Peralatan dan Mesin terlampir pada Lampiran Pendukung B.7).

B.5.2. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Belanja
 Penambahan
 Nilai Peralatan
 dan Mesin
 Rp90.909.000,0
 0

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 30 Juni 2022 adalah Rp90.909.000,00 atau 60,61 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp150.000.000,00.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah Rp90.909.000,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2021 tidak dianggarkan Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin.

Belanja Modal
Lainnya
Rp219.693.000,
00

B.5.3. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 30 Juni 2022 adalah Rp219.684.850,00 atau 100 persen dari Pagu Anggaran setelah revisi senilai Rp219.684.850,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah Rp219.684.850,00 dan Rp1.254.461.978,00.

Tabel B.5.3.1
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
	Belanja Modal Lainnya	219.693.000	219.684.850	100,00	2.220.575.000	1.254.461.978	56,49	(1.034.777.128)
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Bruto)	219.693.000	219.684.850	100,00	2.220.575.000	1.254.461.978	56,49	(1.034.777.128)	43,50
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Netto)	219.693.000	219.684.850	100,00	2.220.575.000	1.254.461.978	56,49	(1.034.777.128)	43,50

Penurunan realisasi belanja modal lainnya Semester I tahun 2022 sebesar Rp1.034.777.128,00 dibandingkan dengan realisasi semester I Tahun 2021, karena adanya penurunan anggaran Belanja Modal Lainnya di tahun 2022, namun secara persentase meningkat sebesar 43,50 persen dan realisasi belanja modalnya lainnya per 30 Juni 2022 telah terealisasi 100 persen.

(Rincian Belanja Modal Lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.8).

Belanja
Penambahan
Nilai Aset Tetap
Lainnya Rp0,00

B.5.4. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) per 30 Juni 2022 adalah Rp0,00 dari Pagu Anggaran senilai Rp465.000.000,00.

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (*Netto*) per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp33.000.000,00.

Rincian Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya jika dibandingkan per 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel B.5.4.1

Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30-Jun-22			30-Jun-21			Kenaikan / Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Bruto) (Rp)	%	(Rp)	%
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	465.000.000	-	-	758.500.000	33.000.000	4,35	(33.000.000)	(4,35)
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Bruto)	465.000.000	-	-	758.500.000	33.000.000	4,35	(33.000.000)	(4,35)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal Lainnya (Netto)	465.000.000	-	-	758.500.000	33.000.000	4,35	(33.000.000)	(4,35)

Penurunan realisasi belanja penambahan nilai aset tetap lainnya Semester I tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja penambahan nilai aset tetap lainnya Semester I tahun 2021 sebesar Rp33.000.000,00 dikarenakan pengembangan aplikasi masih sedang dalam proses.

(Rincian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap lainnya terlampir pada Lampiran Pendukung B.9).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp1.598.941.266,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.598.941.266,00 dan Rp619.367.674,00 .

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut .

Tabel C.1.1
Rincian Aset Lancar
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Lancar	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	744.300.000	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	59.974.300	-
3	Persediaan	794.666.966	619.367.674
Jumlah		1.598.941.266	619.367.674

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp744.300.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing senilai Rp744.300.000,00 dan Rp0,00, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 adalah Rp744.300.000,00. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel C.1.1.1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Saldo UP	8.613.908	-
2	Kwitansi UP yang belum di SPJ kan	591.386.092	-
3	Saldo TUP	144.300.000	-
Jumlah		744.300.000	-

*Kas Lainnya Dan
 Setara Kas
 Rp59.974.300,00*

C.1.2. Kas Lainnya Dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah Rp59.974.300,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas dan Setra Kas Lainnya senilai Rp59.974.300,00 merupakan uang LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diambil oleh pelaksana kegiatan.

*Persediaan
 Rp794.666.966,00*

C.1.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah senilai Rp794.666.966,00 dan Rp619.367.674,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel C.1.3.1
Rincian Persediaan
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Barang Konsumsi	Rp 793.856.966	Rp 619.367.674	Rp 174.489.292	28,17
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 810.000	Rp -	Rp 810.000	100,00
	Jumlah	Rp 794.666.966	Rp 619.367.674	Rp 175.299.292	28,30

Saldo Persediaan Semester I tahun 2022 meningkat sebesar Rp175.299.292,00 jika dibandingkan dengan persediaan tahun 2021 disebabkan adanya efisiensi pemakaian barang persediaan.

Aset Tetap

*Rp11.281.703.784,
00*

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap (Netto setelah Akumulasi Penyusutan) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp11.281.703.784,00 dan Rp11.837.806.090,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut .

Tabel C.2.1
Rincian Aset Tetap
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	Rp 38.965.108.784	Rp 37.737.841.234	Rp 1.227.267.550	3,25
2	Gedung dan Bangunan	Rp 329.071.000	Rp 329.071.000	Rp -	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 164.500.000	Rp 164.500.000	Rp -	-
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 326.916.820	Rp 107.231.970	Rp 219.684.850	204,87
	Jumlah	Rp 39.785.596.604	Rp 38.338.644.204	Rp 1.446.952.400	3,77
	Akum. Penyusutan	Rp (28.503.892.820)	Rp (26.500.838.114)	Rp (2.003.054.706)	7,56
	Nilai Buku Aset Tetap	Rp 11.281.703.784	Rp 11.837.806.090	Rp (556.102.306)	(4,70)

Peralatan dan Mesin
Rp38.965.108.784,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp38.965.108.784,00 dan Rp37.737.841.234,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.2.1.1

Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	37.737.841.234,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin	Rp	1.219.368.550,00
- Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin bulan Juni yang belum terbit SP2D	Rp	7.899.000,00
Mutasi Tambah	Rp	1.227.267.550,00
Mutasi Keluar	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	Rp	38.965.108.784,00
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2022	Rp	(28.383.229.150,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp	10.581.879.634,00

(Nilai buku peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 Rp10.581.879.634,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp28.383.229.150,00 sesuai dengan nilai buku Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 pada tabel Penyusutan Aset Tetap).

Mutasi Tambah

Mutasi Tambah senilai Rp1.227.267.550,00 adalah sebagai berikut .

- a. Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp1.219.368.550,00 (Rincian dapat dilihat di Lampiran Pendukung “Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin”).
- b. Pengadaan speaker computer senilai Rp7.899.000,00 diinput pada modul komitmen pada bulan Juni 2022 sesuai dengan tanggal faktur dan bukti pembayaran yaitu tanggal 23 Juni 2022 melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), namun SPM dan SP2D terbit pada bulan Juli 2022.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin jika dibandingkan dengan penambahan nilai peralatan dan mesin pada laporan neraca terdapat selisih lebih kecil pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp7.899.000,00, karena perbedaan tanggal pencatatan pada modul aset dan terbitnya SPM dan SP2D. Pada modul aset harga perolehan dicatat sesuai faktur yaitu tanggal 23 Juni 2022 dan SP2D terbit tanggal 22 Juli 2022.

Gedung dan Bangunan
Rp329.071.000,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp329.071.000,00 dan Rp329.071.000,00. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Bangunan gudang tertutup permanen milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Gedung dan Bangunan telah dilakukan Revaluasi pada Tahun 2019, sesuai dengan Laporan Hasil IP No. LHIP-72/REV/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 27 November 2019 dan dicatat pada aplikasi SIMAK BMN.

Rincian Hasil Revaluasi adalah sebagai berikut .

Tabel C.2.2.1

Rincian Revaluasi Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah
Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebelum Revaluasi	379,263,000
Nilai Koreksi BMN	(50,192,000)
Saldo Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi	329,071,000

Pada Semester I tahun 2022 tidak terdapat anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan dan tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

(Nilai buku gedung dan bangunan per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp294.063.450,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp35.007.550,00 sesuai dengan nilai buku Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 tabel Penyusutan Aset Tetap).

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp164.500.000,00

C.2.3. Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dapat diukur secara handal.

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp164.500.000,00 dan Rp164.500.000,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan transfer masuk berupa jaringan dan instalasi untuk ruang Agriculture War Room (AWR) Itjentan senilai Rp164.500.000,00 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2021 dan pada Semester I tahun 2022 tidak terdapat penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

(Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp133.700.000,00 setelah dikurangi

akumulasi penyusutan senilai Rp30.800.000,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 tabel Penyusutan Aset Tetap).

Aset Tetap Lainnya
Rp326.916.820,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp326.916.820,00 dan Rp107.231.970,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel C.2.4.1
Aset Tetap Lainnya
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Aset Lancar	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Aset Tetap Renovasi (ATR)	219.684.850	-
2	Aset Tetap Lainnya	107.231.970	107.231.970
Jumlah		326.916.820	107.231.970

Mutasi nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.2.4.2
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	107.231.970,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja modal lainnya (ATR)	Rp	219.684.850,00
Mutasi Tambah	Rp	219.684.850,00
Mutasi Kurang	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	Rp	326.916.820,00
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2022	Rp	(54.856.120,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp	272.060.700,00

Mutasi tambah merupakan pengadaan Renovasi Selasar lantai 2 Wing B senilai Rp219.684.850,00 (Rincian dapat dilihat pada Lampiran Pendukung C.8.Pengadaan Belanja Modal Lainnya (ATR).

(Nilai buku Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 adalah senilai Rp272.060.700,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp54.856.120,00 sesuai dengan nilai buku Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 tabel Penyusutan Aset Tetap).

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp28.503.892.820,00)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp28.503.892.820,00) dan (Rp26.500.838.114,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel C.2.5
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akml. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	38.965.108.784	28.383.229.150	10.581.879.634
2	Gedung dan Bangunan	329.071.000	35.007.550	294.063.450
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	164.500.000	30.800.000	133.700.000
4	Aset Tetap Lainnya	326.916.820	54.856.120	272.060.700
	Jumlah	39.785.596.604	28.503.892.820	11.281.703.784

(Nilai akumulasi penyusutan aset tetap telah sesuai dengan Tabel Penyusutan per 30 Juni 2022).

Aset Lainnya
Rp260.904.010,00

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Nilai Aset Lainnya (Netto setelah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp260.904.010,00 dan Rp499.016.286,00.

Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut .

Tabel C.3.1
Rincian Aset Lainnya
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	2.875.973.094	2.785.064.094	90.909.000
2	Aset Lain-lain	-	2.443.095.458	(2.443.095.458)
3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(2.615.069.084)	(4.729.143.266)	2.114.074.182
Nilai Buku Aset Lainnya		260.904.010	499.016.286	(238.112.276)

Aset Tak Berwujud
Rp2.785.064.094,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.875.973.094,00 dan Rp2.785.064.094,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel C.3.1.1
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.785.064.094,00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan belanja penambahan nilai aset peralatan dan mesin	Rp	90.909.000,00
Mutasi Tambah	Rp	90.909.000,00
Mutasi Kurang		
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2022	Rp	2.875.973.094,00
Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2022	Rp	(2.615.069.084,00)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	Rp	260.904.010,00

Penambahan nilai aset tak berwujud senilai Rp90.909.000,00 merupakan pengadaan Software Microsoft Office yang seharusnya menambah nilai peralatan dan mesin (computer) namun pada aplikasi membentuk NUP baru pada aset tak berwujud. (Rincian aset tak berwujud dilampirkan dalam lampiran).

Aset Lain-lain Rp0,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan Rp2.443.095.458,00.

Pada Semester I TA 2022 tidak terdapat penambahan nilai Aset Lain-lain.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.615.069.084,00)

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah (Rp2.615.069.084) dan (Rp4.729.143.266,00).

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel C.3.3.1

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akml. Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	2.875.973.094	(2.615.069.084)	260.904.010
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	2.875.973.094	(2.615.069.084)	260.904.010

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp4.468.221.733,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp4.468.221.733,00 dan Rp57.048.162,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel C.4.1

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Kewajiban Jangka Pendek	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 2.946.461.311	Rp 57.048.162
Utang Yang Belum Ditagihkan	Rp 777.460.422	
Uang Muka dari KPPN	Rp 744.300.000	Rp -
Jumlah	Rp 4.468.221.733	Rp 57.048.162

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp2.946.461.311,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp2.946.461.311,00 dan Rp57.048.162,00.

Utang kepada pihak ketiga adalah kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.1.1
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	2.850.879.011	56.214.000	2.794.665.011
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	35.608.000	834.162	34.773.838
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	59.974.300	-	59.974.300
	Utang Kepada Pihak Ketiga	2.946.461.311	57.048.162	2.889.413.149

C.4.1.1 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp2.850.879.011,00 dan Rp56.214.000,00.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar adalah perolehan jasa kepada pegawai yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 senilai Rp56.214.000,00 berupa Uang makan Pegawai bulan Desember 2021 senilai Rp52.402.000,00 telah dibayarkan dengan terbit SP2D tanggal 18 Januari 2022 dan Kekurangan Gaji Pegawai karena Kenaikan Pangkat dia tahun 2021 senilai Rp3.812.000,00 telah dibayarkan pada bulan Maret 2022. Maka dengan demikian pada tahun 2022 dilakukan jurnal balik terhadap transaksi tersebut. (Rincian pelunasan utang pegawai tahun 2021 yang telah dibayarkan dan bukti setornya dapat dilihat pada lampiran pendukung).

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 senilai Rp2.850.879.011,00 merupakan pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2021 senilai Rp1.406.581.931,00 dan Gaji Ke-13 senilai Rp1.444.297.080,00 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit SP2D.

C.4.1.2 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp35.608.000,00 dan Rp834.162,00.

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar adalah perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 senilai Rp834.162,00 berupa Tagihan pemakaian telephone bulan Desember 2021 yang baru dibayarkan pada tanggal 14 Januari 2022, sehingga pada tahun 2022 dilakukan jurnal balik terhadap transaksi tersebut. (Rincian pelunasan utang pegawai tahun 2021 yang telah dibayarkan dan bukti setornya dapat dilihat pada lampiran pendukung).

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 senilai Rp35.608.000,00 merupakan Persekot Perjalanan Dinas kegiatan Inspektorat IV yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit SP2D.

C.4.1.3 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp59.974.300,00 dan Rp0,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan kontra pos dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang

merupakan uang LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diambil oleh pelaksana kegiatan senilai Rp59.974.300,00.

*Utang Yang Belum
Diterima Tagihannya
Rp777.460.422,00*

C.4.2. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp777.460.422,00 dan Rp0,00.

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan dan pencatatanya berdasarkan Dokumen BAST.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp744.300.000,00*

C.4.3. Uang Muka KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp744.300.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN Jakarta V sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal Pelaporan.

Uang Muka KPPN per 30 Juni 2022 senilai Rp744.300.000,00 merupakan kontra pos dari Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp600.000.000,00 yang terdiri dari saldo Uang Persediaan (UP) dan Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan, dan kontra pos dari Kas di Bendahara Pengeluaran berupa Tambahan Uang Persediaan (TUP) tunai senilai Rp144.300.000,00.

Ekuitas

Rp8.673.327.327,00

C.5. EKUITAS

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing senilai Rp8.673.327.327,00 dan Rp12.899.141.888,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan pada periode sebelumnya.

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO per 30 Juni 2022 sebagai berikut.

Tabel D.1
Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada LO dan LRA per 30 Juni 2022

Uraian	LO	LRA	Selisih	Referensi
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Pelepasan aset Non Lancar	-	-	-	-
Pendapatan Non Operasional Lainnya	9.127.550	9.127.550	-	D.9.2.1.2
Jumlah	9.127.550	9.127.550	-	

Pendapatan PNBP
Rp0,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2021 tidak ada realisasi pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Beban Pegawai
Rp13.375.507.016,0
0

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.375.507.016,00 dan Rp12.070.967.198,00. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.2.1
Rincian Beban Pegawai
Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Belanja	30 Juni 2022 (Rp)	30 Juni 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	9.657.915.247	8.600.274.975	1.057.640.272	12,30
Belanja Pembulatan Gaji PNS	136.488	121.059	15.429	12,75
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	690.423.880	631.491.226	58.932.654	9,33
Belanja Tunjangan anak PNS	198.769.178	173.848.882	24.920.296	14,33
Belanja Tunjangan Struktural PNS	168.890.000	208.390.000	(39.500.000)	(18,95)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.466.670.000	1.222.835.000	243.835.000	19,94
Belanja Tunjangan PPh PNS	98.795.663	98.101.566	694.097	0,71
Belanja Tunjangan Beras PNS	511.864.560	458.201.340	53.663.220	11,71
Belanja Uang Makan PNS	449.535.000	484.120.150	(34.585.150)	(7,14)
Belanja Tunjangan Umum PNS	131.465.000	135.330.000	(3.865.000)	(2,86)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	-	52.395.000	(52.395.000)	(100,00)
Belanja Uang Lembur	1.042.000	5.858.000	(4.816.000)	(82,21)
Jumlah	13.375.507.016	12.070.967.198	1.304.539.818	10,81

Realisasi Beban Pegawai per 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.304.539.818,00 atau 10,81 persen dibandingkan beban pegawai per 30 Juni 2021. Peningkatan karena adanya gaji bulan Juli 2022 dan gaji ke-13 tahun 2022 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum terbit SP2Dnya sehingga secara akrual membentuk akun belanja pegawai yang masih harus dibayar.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban Pegawai dan Belanja Pegawai per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.2.2
Realisasi Beban dan Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2022

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Pegawai		
			LO	LRA	Selisih
01	511111	Beban/Belanja Gaji Pokok PNS	9.657.915.247	7.542.918.060	2.114.997.187
02	511119	Beban/Belanja Pembulatan Gaji PNS	136.488	105.115	31.373
03	511121	Beban/Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	690.423.880	540.556.392	149.867.488
04	511122	Beban/Belanja Tunj. Anak PNS	198.769.178	154.554.842	44.214.336
05	511123	Beban/Belanja Tunj. Struktural PNS	168.890.000	134.970.000	33.920.000
06	511124	Beban/Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.466.670.000	1.142.290.000	324.380.000
07	511125	Beban/Belanja Tunj. PPh PNS	98.795.663	62.337.032	36.458.631
08	511126	Beban/Belanja Tunj. Beras PNS	511.864.560	399.251.460	112.613.100
09	511129	Beban/Belanja Uang Makan PNS	449.535.000	501.937.000	(52.402.000)
10	511151	Beban/Belanja Tunjangan Umum PNS	131.465.000	102.450.000	29.015.000
12	512211	Belanja Uang Lembur	1.042.000	1.042.000	-
			13.375.507.016	10.582.411.901	2.793.095.115

Realisasi Beban Pegawai pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp13.375.507.016,00 dan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp10.582.411.901,00 sehingga terdapat selisih lebih besar pada Laporan Operasional senilai Rp2.793.095.115,00, karena adanya pelunasan utang kepada pegawai terhadap Tahun Anggaran 2021 senilai Rp56.214.000,00, sehingga secara akrual mengurangi nilai beban pegawai pada tahun 2021 (rincian utang kepada pihak ketiga dan pelunasannya dapat dilihat pada lampiran utang dan pelunasan utang kepada pihak ketiga). Selain itu pada Semester I tahun 2022 terdapat transaksi gaji induk bulan Juli dan Gaji ke 13 yang belum terbit SP2D nya sebesar Rp2.850.879.011,00 dan utang yang belum ditagihkan Rp1.569.896,00.

Beban Persediaan
Rp667.041.714,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp667.041.714,00 dan Rp699.959.462,00.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.3.1

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	30 juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	667.041.714	672.831.800	(5.790.086)	(0,86)
Beban Persediaan Lainnya	-	27.127.662	(27.127.662)	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	667.041.714	699.959.462	(32.917.748)	(4,70)

Realisasi Beban Persediaan per 30 Juni 2022 mengalami penurunan senilai Rp32.917.748,00 atau 4,70 persen jika dibandingkan dengan beban persediaan per 30 Juni 2021 karena adanya efisensi pemakaian Alat Tulis Kantor (ATK) pada Inspektorat Jenderal Kementan.

Beban Barang dan
Jasa
Rp3.178.765.393,0
0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan/ atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lainnya berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.178.765.393,00 dan Rp3.487.026.766,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.4.1
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	528.789.300	581.837.000	(53.047.700)	(9,12)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.943.250	53.908.000	(41.964.750)	(77,85)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	195.330.000	195.702.000	(372.000)	(0,19)
Beban Barang Operasional Lainnya	42.115.099	36.108.800	6.006.299	16,63
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID	381.644.993	-	381.644.993	-
Beban Bahan	387.642.000	230.246.450	157.395.550	68,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	975.793.100	1.158.525.559	(182.732.459)	(15,77)
Beban Langganan Telepon	3.800.007	3.400.946	399.061	11,73
Beban Sewa	71.426.000	14.050.000	57.376.000	408,37
Beban Jasa Profesi	176.717.647	220.400.000	(43.682.353)	(19,82)
Beban Jasa Lainnya	64.531.712	209.310.287	(144.778.575)	100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	339.032.285	783.537.724	(444.505.439)	(56,73)
JUMLAH	3.178.765.393	3.487.026.766	(308.261.373)	(8,84)

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 mengalami penurunan senilai Rp308.261.373,00 atau 8,84 persen jika dibandingkan dengan 30 Juni 2021 karena adanya efiseinsi penyerapan anggaran barang dan jasa.

Pada tahun 2021 terdapat beban barang operasional dan beban jasa - penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp719.549.278,00 atau 38,29 persen dari alokasi anggaran (setelah revisi) senilai Rp1.879.050.000,00. Dan realisasi beban tersebut sesuai dengan realisasi anggaran karena realiasi belanja penanganan Covid-19 telah sesuai dengan akun belanja penanganan Covid-19.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.4.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2022

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
			LO	LRA	Selisih
01	521111	Beban/Belanja Keperluan Perkantoran	528.789.300	481.542.450	47.246.850
02	524114	Beban/Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.943.250	11.243.250	700.000
03	521115	Beban/Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	195.330.000	167.890.000	27.440.000
04	521119	Beban/Belanja Barang Operasional Lainnya	42.115.099	36.593.300	5.521.799
05	521131	Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID	381.644.993	381.644.993	-
06	521211	Beban/Belanja Bahan	387.642.000	355.746.000	31.896.000
07	521219	Beban/Belanja Barang Non Operasional Lainnya	975.793.100	808.469.600	167.323.500
08	522112	Beban/Belanja Langganan Telepon	3.800.007	3.944.903	- 144.896
09	522141	Beban/Belanja Sewa	71.426.000	15.514.000	55.912.000
10	522151	Beban/Belanja Jasa Profesi	176.717.647	73.900.000	102.817.647
11	522191	Beban/Belanja Jasa Lainnya	64.531.712	39.211.712	25.320.000
12	522192	Beban/Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	339.032.285	337.904.285	1.128.000
			3.178.765.393	2.713.604.493	465.160.900

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp3.178.765.393,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp2.713.604.493,00 sehingga terdapat selisih besar pada Laporan Operasional senilai Rp465.160.900,00, karena adanya pembayaran pemakaian jasa telekomunikasi bulan Desember 2021 senilai Rp834.162,00 yang seharusnya dibebankan pada periode pelaporan tahun 2021 namun baru direalisasikan tanggal 18 Januari 2022, sehingga mengurangi nilai beban langganan telepon tahun 2022 dan senilai Rp465.995.062,00 yang merupakan Utang yang Belum Ditagihkan.

Beban

Pemeliharaan

Rp1.062.745.474,0

0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.062.745.474,00 dan Rp940.700.650,00.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.5.1
Rincian Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.214.520	96.709.233	29.505.287	30,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	879.203.204	776.483.317	102.719.887	13,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.137.750	66.643.100	(9.505.350)	(14,26)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	190.000	865.000	(675.000)	(78,03)
Jumlah	1.062.745.474	940.700.650	122.044.824	12,97

Realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp121.044.824,00 atau 12,97 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2021, karena meningkatnya kebutuhan belanja pemeliharaan gedung dan peralatan dan mesin.

Rincian Perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.5.2
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Pemeliharaan
Per 30 Juni 2022

No	Kode Perkiraan	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa		
			LO	LRA	Selisih
01	523111	Beban/Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.214.520	126.214.520	-
02	523121	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	879.203.204	828.002.674	51.200.530
03	523129	Beban/Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.137.750	57.137.750	-
04	593113	Beban/Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	190.000	-	190.000
			1.062.745.474	1.011.354.944	51.390.530

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp1.062.745.474,00 dan realisasi Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp1.011.354.944,00 sehingga terdapat selisih lebih besar pada Laporan Operasional senilai Rp51.390.530,00.

Selisih perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan dikarenakan adanya Utang Yang Belum Ditagihkan senilai Rp51.200.530,00 dan pemakaian barang habis pakai berupa persediaan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp190.000,00 yang merupakan akun persediaan dan realisasi belanjanya menggunakan belanja persediaan.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp23.641.637.564,
00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.641.637.564,00 dan Rp25.025.973.524,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.6.1
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	19.350.495.404	20.985.252.244	(1.634.756.840)	(7,79)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.142.062.160	249.540.000	3.892.522.160	1.559,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	133.190.000	22.400.000	110.790.000	494,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.890.000	3.768.781.280	(3.752.891.280)	(99,58)
Jumlah	23.641.637.564	25.025.973.524	(1.384.335.960)	(5,53)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.384.335.960,00 atau 5,53 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021. Penurunan beban realisasi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2021 karena masih tingginya kasus COVID 19 maka sebagian besar perjalanan dinas dilaksanakan disekitar pulau Jawa.

Rincian Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut .

Tabel D.6.2.
Perbandingan Realisasi Beban dan Belanja Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2022

No	Kode	Uraian	Realisasi Beban/Belanja Perjalanan Dinas		
	Perkiraan		LO	LRA	Selisih
01	524111	Beban/Belanja Perjalanan Biasa	19.350.495.404	19.314.887.404	35.608.000
02	524113	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.142.062.160	133.190.000	4.008.872.160
03	524114	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	133.190.000	15.890.000	117.300.000
04	524119	Beban/Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.890.000	3.976.222.160	(3.960.332.160)
			23.641.637.564	23.440.189.564	201.448.000

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO) senilai Rp23.641.637.564,00 dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) senilai Rp23.440.189.564,00, sehingga terdapat selisih lebih besar pada LO senilai Rp201.448.000,00. Selisih tersebut karena adanya utang yang belum ditagihkan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.300.737.722,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai Rp2.300.737.722,00 dan Rp1.904.292.126,00.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.7
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.981.303.091	1.550.320.343	430.982.748	27,80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.500.755	3.500.755	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	7.700.000	7.700.000	-	-
Jumlah Penyusutan	1.992.503.846	1.561.521.098	430.982.748	27,60
Beban Amortisasi	308.233.876	342.771.028	(34.537.152)	(10,08)
Jumlah Amortisasi	308.233.876	342.771.028	(34.537.152)	(10,08)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.300.737.722	1.904.292.126	396.445.596	20,82

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp396.445.596,00 atau 20,82 persen jika dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2021, karena adanya penambahan nilai aset dari pembelian tahun berjalan sehingga nilai penyusutannya juga meningkat.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00*

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang PNPB dan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp(70.000,00).

Pada Semester I tahun 2022 tidak terdapat tagihan piutang sehingga tidak terdapat akun beban penyisihan Piutang.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp9.127.550,00

D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing masing Rp9.127.550,00 dan Rp2.029.110,00.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.127.550	2.029.110	7.098.440	349,83
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9.127.550	2.029.110	7.098.440	349,83

Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp7.098.440,00 karena adanya Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Rehap Ruang Rapat Kapabilitas APIP dan Rehab Musholla Gedung B lantai 2.

D.9.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari pelepasan aset non lancar per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah nihil. Dan pada semester I TA.2022 belum dilakukan lelang aset milik Itjentan.

D.9.2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai bernilai nihil karena pada ltjenta tidak terdapat kewajiban jangka Panjang.

D.9.3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai Rp9.127.500,00 dan Rp2.092.110,00.

Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9.3.1
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.127.550	2.029.110	7.098.440	349,83
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	9.127.550	2.029.110	7.098.440	349,83

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2022 meningkat senilai Rp7.098.440,00 atau 349,83 persen dibandingkan dengan per 30 Juni 2021 karena adanya setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Rehap Ruang Rapat Kapabilitas APIP dan Rehap Musholla Gedung B lantai 2.

D.9.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing senilai Rp9.127.550,00 dan Rp2.029.110,00.

Rincian Pendapatan dari kegiatan non Operasional Lainnya pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.9.3.1.1
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	8.952.250	-	8.952.250	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	175.300	185.510	(10.210)	(5,50)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.843.600	(1.843.600)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.127.550	2.029.110	7.098.440	349,83

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2022 meningkat senilai Rp7.098.440,00 atau 349,83 persen dari per 30 Juni 2021, karena adanya setoran kelebihan pembayaran pekerjaan Rehab Ruang Rapat Kapabilitas APIP dan Rehab Musholla Gedung B lantai 2.

Tabel D.9.3.1.2
Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pada LO dan LRA Per 30 Juni 2022

Akun	Uraian	LO	LRA	Selisih
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	8.952.250	8.952.250	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	175.300	175.300	-
	Jumlah	9.127.550	9.127.550	-

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan menurut LRA pada periode yang sama tidak terdapat selisih.

D.9.3.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing bernilai nihil, karena tidak ada transaksi non operasional lainnya yang dapat menjadi beban.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12.889.141.888,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.899.141.888,00 dan Rp7.342.378.542,00.

Surplus(defisit) LO

Rp(44.217.307.333,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah defisit sebesar Rp44.217.307.333,00 dan Rp44.126.820.616,00.

Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa (laporan Operasional).

Koreksi Yang Menambah

/Mengurangi Ekuitas

Rp(31.338.260,00)

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(31.338.260,00) dan Rp0,00. Koreksi karena adanya koreksi asset non revaluasi yang disebabkan transaksi pada penyusutan transaksional pada reklas masuk.

Transaksi Antar Entitas

Rp40.022.831.032,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp40.022.831.032,00 dan Rp47.972.385.468,00.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel E.6
Rincian Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Uraian Beban	30 Juni 2022	30 Juni 2021	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Ditagihkan Ke Entitas Lain	40,031,958,582	44,127,864,919	(4,095,906,337)	(9.28)
Diterima dari Entitas Lain	(9,127,550)	(16,609,310)	7,481,760	(45.05)
Transfer Masuk	-	3,861,129,859	(3,861,129,859)	(100.00)
Jumlah Transaksi Antar Entitas	40,022,831,032	47,972,385,468	(7,949,554,436)	(16.57)

Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Inspektorat Jenderal yang melibatkan ke Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022 Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) senilai Rp40.031.958.582,00 sedangkan Ditagihkan Dari Entitas Lain (DDEL) senilai Rp9.127.550,00.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp(4.225.814.561,00)

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Entitas untuk periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.225.814.561,00) dan Rp3.845.564.852,00.

Penurunan saldo Ekuitas per 30 Juni 2022 dikarenakan menurunnya realisasi belanja pada Semester I tahun 2022.

Ekuitas Akhir
Rp8.673.327.327,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada periode 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp8.673.327.327,00 dan Rp11.187.943.394,00.

Ekuitas akhir pada periode 30 Juni 2022 sebesar Rp8.673.327.327,00 adalah Ekuitas Awal senilai Rp12.899.141.888,00 dikurang penurunan Ekuitas senilai Rp4.225.814.561,00.

Ekuitas Akhir pada periode 30 Juni 2022 sama dengan nilai ekuitas pada Laporan Neraca periode 30 Juni 2022.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang mempunyai konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menerapkan aplikasi SAKTI dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2022. Dan melaksanakan proses Rekonsiliasi data pada SAKTI dan SPAN pada aplikasi MONSAKTI.
2. Sebelum menyusun Laporan Keuangan Semester I tahun 2022, satuan kerja wajib melakukan Migrasi Saldo, dengan mengangkat saldo akhir pada aplikasi e-Rekon menjadi saldo awal pada aplikasi SAKTI. Proses Migrasi saldo awal dilakukan oleh seluruh modul pelaporan yaitu Modul Aset, Modul Persediaan dan Modul GLP dan mengupload Berita Acara Migrasi pada aplikasi MONSAKTI. Inspektorat Jenderal telah menyelesaikan proses Migrasi saldo pada setiap Modul Pelaporan.
3. Nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I tahun 2022 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI Eselon I.
4. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan No.S-73/PB.6/2022 tanggal 25 Juli 2022, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2022, pada aplikasi SAKTI Modul Aset wajib melakukan tutup buku sampai dengan bulan Juni 2022 agar menghasilkan jurnal penyesuaian / amortisasi Semester I TA.2022, begitu pula untuk Modul Persediaan harus melakukan Tutup buku sampai dengan bulan Juni 2022, namun berbeda dengan modul GLP yang melakukan tutup buku sementara sampai dengan bulan Mei 2022.

5. Proses Rekonsiliasi satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Semester I TA. 2022 pada aplikasi MONSAKTI telah selesai dilaksanakan dan diterbitkannya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Berdasarkan tidak terdapat TDK Rupiah dan TIDAK COA.
6. Realisasi belanja untuk penanganan Pandemi COVID-19 senilai Rp719.549.278,00 atau 38,29 persen dari anggaran untuk COVID-19 senilai Rp1.879.050.000,00,00 hanya untuk operasional kantor dan kebutuhan pegawai Itjentan sehingga tidak mengakibatkan timbulnya transaksi pendapatan dan hibah, dan realisasi sesuai dengan akunnya sehingga tidak mengakibatkan adanya selisih antara realisasi belanja dan beban terhadap akun tersebut.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta keamanan dana APBN, Kementerian Keuangan melakukan modernisasi Rekening Pemerintah dengan diterbitkannya PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara dan Lembaga, pada PMK tersebut yang disampaikan bahwa rekening pengeluaran pada satuan kerja dilakukan restrukturisasi dari rekening giro ke rekening virtual (virtual account). Maka pada tanggal 29 Desember 2020 telah dilakukan penutupan rekening Itjen Kementan dengan Nomor rekening 127-00-8700019-4. Dan pada tahun 2021 dilakukan pembukaan rekening baru dengan nama pemilik rekening **BPG 139 Itjen Kementan**, dan nomor rekening 8100122382471000.

Saldo Rekening Itjentan per 30 Juni 2022 adalah Rp212.888.208,00. Data tersebut berdasarkan Rekening Koran per 30 Juni 2022. (Rekening Koran terlampir).

F.4. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DAN ITJENTAN

Monitoring tindak lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020, terlampir.

